

PROFIL PRANATA SOSIAL DI CIMAH

(Studi Kasus di Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan)

Suyanto

ABSTRAK

Pranata Sosial adalah perkumpulan sosial yang merupakan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) atau sebagai sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput bisa berbentuk usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial pada komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah, tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah, lembaga tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang upaya kesejahteraan sosial.

Sasaran identifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sosial di tingkat lokal atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (kelurahan); (2) Memiliki nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.

Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai Pranata Sosial atau perkumpulan sosial khususnya yang berada di Kelurahan Cibereum adalah sebagai berikut: (1) Pranata Sosial tersebut sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok sosial di kelurahan ini lebih dari 300 kelompok perkumpulan dan dikelompokkan dalam 17 jenis kelompok; (3) Pranata Sosial yang ada dibentuk dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam upaya mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomsili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan perkumpulan sosial (Pranata Sosial) kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya; (5) Kegiatannya diwarnai dan dijiwai semangat kebersamaan yang intinya ingin membantu orang lain melalui gotong royong.

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber-sumber yang relevan.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu memberikan sumbangan yang nyata dan bermakna bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut maka program pembangunan kesejahteraan sosial perlu merespon terjadinya perubahan masyarakat.

Ketika kondisi perekonomian nasional dalam keadaan normal, kebijaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada paradigma pembangunan yang mengandalkan

pada pertumbuhan ekonomi. Ketika itu pendekatan pembangunan kesejahteraan yang digunakan adalah *residual approach* yakni pelayanan sosial diberikan manakala permasalahan sosial sudah muncul. Gaya pendekatan seperti itu menyebabkan pembangunan kesejahteraan sosial yang diemban Departemen Sosial terkesan *charity* dan terlambat. Setelah mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997 menyebabkan sumber daya moneter menjadi terbatas, akibatnya anggaran yang disediakan untuk Departemen Sosial juga menjadi terbatas pula.

Menyadari kondisi tersebut, penyelenggaraan atau pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dalam kerangka ini perlu mengembangkan wacana dan pemikiran

tentang “*think globally, act locally*”. Pemikiran membantu dalam merancang strategi penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan bangsa maupun tuntutan dunia. Sehubungan dengan itu berbagai konsep pembangunan sosial yang berkembang perlu dipahami dengan benar oleh para pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Pendekatan yang perlu dikembangkan adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *people centered development* (PCD). Dalam program ini partisipasi masyarakat, demokratisasi, *civil society* dan *social welfare for all* menjadi perhatian pemerintah. Salah satu strategi pemerintah dalam konsep pendekatan PCD adalah pemberdayaan masyarakat terutama yang menjadi sasaran pelayanan sosial adalah Pranata Sosial. Dalam kenyataannya pranata sosial merupakan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, atau perkumpulan sosial yang ada di komunitas lokal.

Seperti diketahui bahwa pranata sosial yang ada dan eksis di masyarakat saat ini dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat untuk memberikan pelayanan sosial. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, berkembang pemikiran bahwa pembangunan yang demokratis hanya dapat diwujudkan dari lapisan bawah (*grass roots*). Demokrasi lokal atau pada *grass root level* ini akan mampu mendorong terwujudnya demokratisasi bisa di tingkat nasional. Oleh karena itu para pelaku pembangunan kesejahteraan sosial sangat berkepentingan untuk mengembangkan *civil society* sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial.

Di Indonesia, *civil society* bisa berwujud dalam bentuk organisasi pelayanan sosial, lembaga swadaya masyarakat/LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, perkumpulan atau institusi yang tumbuh pada komunitas lokal sebagai kearifan lokal/budaya/adat istiadat. Dengan demikian *civil society* ini juga bisa disebut sebagai Pranata Sosial yang bila diartikan secara sempit ada yang berbentuk formal dan non formal. Pranata sosial formal biasanya dibentuk atas prakarsa kebutuhan pelayanan yang biasanya keberadaannya sudah berbentuk organisasi/kelompok masya-

rakat. Kelompok masyarakat tersebut terbentuk biasanya karena intervensi dari pihak luar dan didukung pemerintah daerah bahkan sampai di tingkat pusat atau organisasi yang besar yang bertaraf nasional dan bahkan internasional. Sedangkan Pranata sosial non formal dibentuk atas prakarsa warga masyarakat setempat berdasarkan atas nilai-nilai yang berbau lokal dan memiliki norma-norma yang masih berlaku secara lokal. Contoh pranata sosial yang formal adalah perkumpulan yang terbentuk dari etnis tertentu, agama, profesi, kebutuhan warga masyarakat tertentu; oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini Departemen Sosial RI sudah mulai mengarahkan program-programnya pada strategi pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pranata sosial.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan berpengaruh pada keberadaan pranata sosial tersebut. Adanya desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah, banyak program-program pembangunan yang telah menyentuh sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di era reformasi dan globalisasi ini. Sentuhan program pembangunan tersebut tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan dan eksistensi kelembagaan atau pranata sosial di masyarakat, termasuk kearifan lokalnya, yang selama ini secara turun temurun dipatuhi dan dijadikan pedoman hidup bagi warga masyarakat tertentu di pedalaman. Perubahan pola hidup masyarakat ke arah modernisasi ini merupakan salah satu contoh yang tidak dapat dihindari kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Departemen Sosial yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengembangkan ketahanan sosial masyarakat sebagai salah satu elemen untuk memperkuat ketahanan nasional, pranata sosial merupakan salah satu wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui lembaga sosial kemasyarakatan atau pranata sosial program ketahanan sosial masyarakat dapat diwujudkan ditengah semakin menyusutnya keberadaan pekerja sosial masyarakat.

Sesuai dengan Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat yaitu perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan penyandang

masalah sosial, partisipasi sosial masyarakat dalam organisasi sosial, pengendalian terhadap konflik sosial dan kearifan lokal dalam memelihara sumberdaya alam dan sosial, program pengembangan ketahanan sosial masyarakat difokuskan. Pranata sosial dalam hal ini cukup berperan penting untuk mensukseskan program ketahanan sosial masyarakat tersebut.

Untuk lebih memudahkan dan meng-efektifkan program tersebut, sebaiknya mengetahui akan keberadaan pranata sosial yang ada di masyarakat, terutama pada komunitas lokal. Data dan informasi mengenai keberadaan pranata sosial ternyata belum tersedia secara memuaskan.

Oleh karena itu, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Departemen Sosial melakukan kajian untuk mengidentifikasi Pranata sosial pada salah satu komunitas lokal di daerah Kota Cimahi, tepatnya di Kelurahan Cibereum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Program Keluarga Sejahtera yang dikenal dengan TAKESRA (Tabungan Kesejahteraan Rakyat) dan KUSESRA (Kelompok Usaha Kesejahteraan Sosial) dimotori oleh BKKBN, kemudian Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang pelaksanaannya dikembangkan Bappenas. Sedangkan Departemen Sosial RI sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS). Program Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan semenjak REPELITA III namanya Bimbingan dan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat serta Usaha Swadaya Sosial Masyarakat (BPKM-USSM). Setelah Departemen Sosial berdiri lagi Program Kesejahteraan Sosial oleh Direktorat Pemberdayaan, Departemen Sosial RI mulai mengembangkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah PCD. Pemberdayaan yang terpusat pada masyarakat ini terutama ditujukan kepada pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ternyata baru dalam tahap pendataan. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Karena dari berbagai studi

menunjukkan bahwa peranan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sangat potensial dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi yang dilakukan melalui perkumpulan yang sudah dikenalnya atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan suatu kegiatan ditingkat masyarakat akan kurang berhasil secara optimal bilamana tidak melibatkan dan memperhitungkan keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Peran aktif kelompok lokal lebih jauh lagi dapat memfasilitasi persatuan nasional dan mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok untuk partisipasi, berpolitik dan pengaturan diri yang lebih mandiri.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (kelurahan).
2. Aparat pemerintah kelurahan/tempat perkumpulan sosial berdomisili dan melaksanakan kegiatan sosial.
3. Nilai sosial budaya lokal, yang meliputi adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.

Meskipun beberapa studi berhasil menunjukkan peran aktif dan memberi kontribusi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun demikian sampai saat ini belum tersedia adanya data tentang keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat, baik dalam jumlah, bentuk dan tipologi atau model-model kegiatannya.

Pada tahun 1997/1998 dengan terjadinya krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi, masalah kemiskinan kembali meningkat; karena banyak penduduk sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pada bulan April 1998 menurut BPS jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 79,4 juta jiwa atau 33,9% dari seluruh penduduk yang jumlahnya mencapai 202 juta (Kepala BPS, Sigitto Soewito, MA).

Dalam kaitan ini, Departemen Sosial RI melalui pembangunan Kesejahteraan Sosial sejak REPELITA IV telah melaksanakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan amanat konstitusi yang dikenal dengan Program Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (PROKESOS KUBE). Sedangkan secara nasional pengentasan kemiskinan pada intinya adalah kegiatan Program Keluarga Sejahtera, Program IDT, PROKESOS, Program Pendidikan dan Latihan serta program terkait lainnya. Program-program tersebut merupakan bagian dari 3 (tiga) kelompok kebijaksanaan pembangunan yang luas (Laporan terpadu PROKESRA 1997).

PROKESOS pada dasarnya adalah program pengentasan kemiskinan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Secara kuantitas jumlah perkumpulan sosial/pranata sosial atau yang dikenal dengan sebutan WKSMB (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) ada di semua wilayah Kelurahan yang ada di Kota Cimahi yang berjumlah 15 Kelurahan. Namun sejauhmana strategi dan program WKSMB tersebut belum diperoleh informasi. Disamping itu, bagaimana metode dan teknik pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan, yang mungkin sudah dilihat secara internal pada program implementer perlu diinventarisasi dan dievaluasi sebagai masukan bagi pengembangan

program pemberdayaan dimasa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Pusat Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial pada awal tahun 2006 mulai mencoba mengadakan kegiatan mengidentifikasi profil pranata sosial berupa perkumpulan atau WKSMB dan kegiatannya dalam pemanfaatan kesejahteraan sosial karena itu dipandang perlu untuk diteliti.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan data kualitatif. Bahasannya adalah hasil pelaksanaan pendataan program pemberdayaan untuk perkumpulan sosial yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial dan bantuan pemberian pelayanan bagi masyarakat melalui pendekatan kelompok swadaya masyarakat di tingkat kelurahan. Fokus telaahan pada kondisi pranata sosial, struktur organisasi, sumber dana, kondisi tenaga, proses pelaksanaan pemberdayaan dan manfaat atau keberhasilan usaha dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di lingkungannya.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan adanya program yang menjadi sasaran penelitian yang telah melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial, yakni Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan. Pemilihan informan juga ditentukan secara purposif dan jumlah responden sebanyak 303 orang semuanya dari pengurus atau anggota kelompok salah satu perkumpulan.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan perkumpulan yang sebagian besar adalah bentukan warga yang tumbuhnya dari masyarakat lokal dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga Teknik yakni: (a) Wawancara, (b) observasi dan (c) Studi Dokumentasi. Analisa terfokus pada data kualitatif dalam mendeskripsikan kondisi kelompok.

Ada lima aspek yang menjadi perhatian dalam pengkajian ini: (1) Identitas perkumpulan sosial atau wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; (2) Keanggotaan; (3) Sumber daya dan dana; (4) Program dan kegiatan lembaga; dan (5) Jaringan kerja.

III. HASIL PENELITIAN

A. Monografi Lokasi Penelitian

Wilayah Kelurahan Cibereum memiliki luas wilayah 274,71 km² dengan perincian untuk tanah pemukiman seluas 178,50 km², kuburan 1,50 km², pekarangan 5,50 km², taman 2,50 km², perkantoran 0,71 km² dan untuk prasarana umum 86,00 km². Wilayah Kelurahan Cibereum dibagi dalam 23 Rukun Warga (RW) dan 170 Rukun tetangga (RT). dengan jumlah 11.571 kepala Keluarga (KK) dan jumlah penduduk 39.652 jiwa.

Mata pencaharian penduduk beraneka ragam mata pencaharian dan tidak ada mata pencaharian penduduk yang mayoritas. Mata pencaharian penduduk adalah buruh/pegawai swasta, pegawai negeri, pengrajin, penjahit, petani, peternak, usaha warungan (dagang), sopir, dokter, montir, pertukangan kayu dan batu, pengemudi becak, TNI/Polri, pengusaha dan lain-lain.

B. Identitas Kelembagaan Perkumpulan Sosial di Lokasi Penelitian

Kajian Pranata Sosial atau yang disebut sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cibereum dari hasil pendataan tersebut diperoleh 307 kelompok atau perkumpulan sosial (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/WKSMBM). Terhimpun dalam 17 jenis kelompok/ perkumpulan sosial yang dikategorikan dalam Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Jenis-jenis kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kelompok/perkumpulan Sosial di Kelurahan Cibereum.

No	Jenis Kelompok	Tahun Berdiri					
		< 10 Tahun		> 10 Tahun		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dasa Wisma	16	15,38	88	84,62	104	100
2	Posyandu	3	15,00	17	85,00	20	100
3	BKB	0	0	4	100,00	4	100
4	KUBE	0	0	1	100,00	1	100
5	Pemuda/Karangtaruna	10	55,60	8	44,40	18	100
6	KWT	2	100,00	0	0	2	100
7	PHBI	1	100,00	0	0	1	100
8	Pengajian	3	16,66	15	83,33	18	100
9	Paguyuban Warga Desa	6	7,89	70	92,11	76	100
10	BKL	0	0	3	100,00	3	100
11	BKR	0	0	3	100,00	3	100
12	LPM/LKMD	0	0	1	100,00	1	100
13	Peta Keluarga	2	18,18	9	81,82	11	100
14	R/1/KS	0	0	18	100,00	18	100
15	R/1/SUB	0	0	18	100,00	18	100
16	UP2KS	0	0	3	100,00	3	100
17	UP2K	0	0	6	100,00	6	100
Jumlah		43	14,47	264	85,53	307	100

Sumber: Hasil Pendataan di Wilayah Kelurahan Cibereum Tahun 2006.

Dari data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun berdirinya sebagian besar 82,35 % atau sebanyak 14 jenis WKSBM telah berumur atau berdiri lebih dari 10 tahun; yang berumur kurang dari 10 tahun ada 3 jenis lembaga perkumpulan (Pranata Sosial/ WKSBM) atau sebesar 17,65%. Keadaan ini menunjukkan bahwa kepentingan bersama telah lama dirasakan, diupayakan, dan dicarikan jalan pemecahannya yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok tersebut biasanya dimulai dari tingkat Rukun Tetangga, Dasawisma, kelompok PKK dan usaha bersama berupa paguyuban. Semua kelompok tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota, sesuai kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan warganya. Untuk itu masing-masing WKSBM atau kelompok sosial memiliki identitas yang berupa nilai dan norma yang membedakan antar kelompok tersebut. Dengan adanya nilai dan norma yang ada, serta harus dijadikan pedoman bagi anggotanya maka pranata sosial atau WKSBM dapat diuraikan satu persatu dari maksud didirikannya lembaga sosial tersebut. Untuk mengetahui identitas perkumpulan yang ada di wilayah Kelurahan Cibeureum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkumpulan dasawisma. Dasawisma ini memiliki identitas kelompok yang beranggotakan kurang lebih 10 Kepala Keluarga (KK). Pada umumnya anggotanya terdiri dari kaum wanita dan ibu rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pertemuan rutin melalui acara arisan, simpan pinjam, tabungan, ceramah keagamaan atau usaha-usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Perkumpulan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Kelompok ini biasanya beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak balita. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat atas prakarsa dari pemerintah. Tujuan kelompok ini untuk meningkatkan kesehatan anak serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Keegiatannya antara lain pemeriksaan kesehatan balita, menimbang balita, pelayanan keluarga berencana dan penyuluhan peningkatan gizi keluarga.
3. BKB (Bina Keluarga Balita). Kelompok ini beranggotakan ibu rumah tangga yang memiliki balita. Tujuan kelompok ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan seperti arisan, simpan pinjam, tabungan, gotong royong, usaha ekonomis produktif yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Mempunyai jangkauan wilayah berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, hingga Kelurahan.
4. Peta Keluarga. Kelompok ini beranggotakan kaum wanita dan ibu rumah tangga sebagaimana pada no.3. Tujuan kelompok ini adalah usaha peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan seperti arisan, simpan pinjam, tabungan, gotong royong, usaha ekonomis produktif yang dikerjakan oleh kaum wanita. Mempunyai jangkauan wilayah berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
5. KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Kelompok ini pada umumnya beranggotakan 10 kepala keluarga dari keluarga kurang mampu (miskin) yang memiliki usaha kecil-kecilan. Kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan penghasilan dengan kegiatan utama adalah ekonomi produktif. Pembentukan kelompok ini pada umumnya diprakarsai oleh pemerintah melalui proyek-proyek tertentu.
6. PEMUDA. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat dengan anggota yang memiliki kriteria keanggotannya berusia tertentu yaitu antara usia 19 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Kelompok pemuda ini pada umumnya memiliki kegiatan *edukatif*, ekonomis produktif dan rekreatif.
7. KWT (Kelompok Wanita Tani). Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat atas prakarsa pemerintah dalam upaya peningkatan hasil pertanian. Kelompok ini beranggotakan para wanita petani dan memiliki kegiatan usaha peningkatan penghasilan melalui pertanian.

8. Pengajian. Kelompok ini terdiri dari majlis Ta'lim dan Takmir masjid. Kelompok ini dibentuk masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi kaum muslim. Kegiatan yang dilakukan kelompok ini diantaranya adalah mengadakan pengajian.
 9. BKL (Bina Keluarga Lansia). Tujuan dibentuknya kelompok lansia ini oleh masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan cara memberikan pelayanan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia, senam sehat bagi lansia serta kegiatan dalam upaya pengembangan konsep "tua berguna".
 10. PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). Tujuan dibentuknya kelompok ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi umat islam di Kelurahan Cibereum melalui pembentukan kepanitiaan yang dibentuk dari perwakilan pemuda majid yang ada di seluruh kelurahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi antar pemuda masjid dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan yang dilakukan kelompok ini adalah kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan.
 11. KPW (Kelompok Paguyuban Warga). Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Tetapi pada umumnya banyak yang berfungsi sebagai "wahana rembug desa". Biasanya kelompok ini beranggotakan bapak-bapak dan mengadakan pertemuan setiap 30 hari sekali. Pada acara pertemuan rutin tersebut biasanya diisi dengan acara-acara rembug desa, arisan, simpan pinjam, gotong- royong dan lain sebagainya sesuai keperluan.
 12. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Kelompok ini dibentuk dengan prakarsa dari pemerintah dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan di tingkat desa.
 13. R/1/KS (Kelompok Registrasi Keluarga Sejahtera). Kelompok ini di bentuk atas program dari BKKBN.
 14. R/1/SUB (Registrasi Sub Kelompok di Tingkat RW). Kelompok ini di bentuk atas program dari BKKBN.
 15. UP2KS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Kelompok ini dibentuk oleh pemerintah melalui program dari BKKBN dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan wanita dan keluarga.
 16. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kelompok ini dibentuk masyarakat atas prakarsa ibu-ibu PKK dengan tujuan meningkatkan derajat kesejahteraan wanita dan keluarga.
 17. BKR (Bina Keluarga Remaja). Tujuan dibentuknya kelompok remaja oleh masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan remaja dengan cara memberikan pelayanan kegiatan untuk mengisi waktu luang bagi para remaja serta kegiatan dalam upaya pengembangan bakat remaja.
- Dari jumlah jenis perkumpulan tersebut di atas paling banyak adalah Dasa Wisma dengan jumlah 104 kelompok atau sebesar (34,21%) diikuti kelompok paguyuban Warga Desa dengan jumlah 76 kelompok atau sebesar (25,00%), Posyandu sebanyak 20 kelompok atau sebesar (6,58%) dan kelompok Pemuda/ Karangtaruna, Pengajian, R/1/KS dan R/1/SUB masing sebanyak 18 kelompok atau sebesar (5,92%). Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan kelompok berdasar pada "kewilayahan" yaitu pada Rukun Warga dan "kebutuhan bersama dalam kelompok kecil" seperti Rukun Tetangga yang tergabung dalam kelompok paguyuban warga desa, Dasawisma, dan lain-lain.
- Sedangkan jika dilihat tujuan dari pembentukan kelompok ada bermacam-macam, yakni: untuk meningkatkan kesejahteraan anak, Kesejahteraan ibu dan anak, Kesejahteraan lansia, peningkatan pendapatan, integrasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tujuan Didirikannya Perkumpulan Sosial.

No	Tujuan Didirikannya Perkumpulan	Jumlah	%
1	Kesejahteraan Anak	26	8,47
2	Kesejahteraan Ibu dan Anak	41	13,36
3	Kesejahteraan Lanjut Usia	3	0,98
4	Peningkatan Penghasilan	87	28,34
5	Integrasi Masyarakat/kerukunan warga	91	29,64
6	Bantuan Sosial	10	3,26
7	Pengajian	18	5,86
8	Meningkatkan Iman dan Taqwa	18	5,86
9	Meningkatkan Keterampilan	11	3,58
10	Pelayanan kesehatan	2	0,65
Jumlah		307	100,00

Sumber: Hasil Pendataan di Wilayah Kelurahan Cibeureum Tahun 2006.

Keadaan ini menguatkan anggapan bahwa perkumpulan tersebut dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

C. Keanggotaan

Keanggotaan perkumpulan sosial hasil kajian adalah jumlah anggota, kriteria anggota, syarat menjadi anggota dan periode kepengurusan. Akan diuraikan berikut:

beranggotakan antara 11-20 orang terbanyak adalah dari dasawisma.

Syarat menjadi anggota kelompok perkumpulan sosial ternyata sebagian besar (88,60%) atau sebanyak 272 kelompok tinggal dalam suatu wilayah RT/RW/Kelurahan, kelompok ini menduduki jumlah terbanyak karena tidak memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan sebagian kecil kelompok untuk menjadi anggota suatu

Tabel 3. Jumlah Anggota Kelompok Sosial.

No	Jenis Kelompok	Jumlah Anggota							
		< 10 orang		11 – 20 orang		>20 orang		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dasa Wisma	15	14,42	78	75,00	11	10,58	104	100
2	Posyandu	0	0	4	20,00	16	80,00	20	100
3	BKB	0	0	1	25,00	3	75,00	4	100
4	KUBE	1	100	0	0	0	0	1	100
5	Pemuda/Karangtaruna	0	0	5	27,80	13	72,20	18	100
6	KWT	1	50,00	1	50,00	0	0	2	100
7	PBHI	0	0	0	0	1	100	1	100
8	Pengajian	0	0	1	5,56	17	94,44	18	100
9	Paguyuban Warga Desa	0	0	4	5,26	72	94,74	76	100
10	BKL	0	0	1	33,33	2	66,67	3	100
11	BKR	0	0	0	0	3	100	3	100
12	LPM/LKMD	1	100	0	0	0	0	1	100
13	Peta Keluarga	0	0	3	27,27	8	72,73	11	100
14	R/1/KS	0	0	0	0	18	100	18	100
15	R/1/SUB	0	0	0	0	18	100	18	100
16	UP2KS	0	0	0	0	3	100	3	100
17	UP2K	0	0	0	0	6	100	6	100
Jumlah		17	3,40	98	16,20	191	80,40	307	100

Sumber: Hasil Pendataan di Wilayah Kelurahan Cibeureum Tahun 2006.

Dari data tersebut yang merupakan hasil kajian diketahui bahwa semua informan mengatakan mengetahui jumlah anggotanya dengan pasti. Dari data yang ada pada 17 jenis perkumpulan tersebut ternyata jumlah anggota lebih dari 20 orang yang terbanyak adalah dari kelompok rukun tetangga yang disebut paguyuban warga desa. Sedang yang

kelompok yang mensyaratkan anggotanya dengan berdasarkan pada keterampilan sebesar 4,23% atau sebanyak 13 kelompok; yang diikuti dengan berdasarkan pada tingkat pendidikan ada sebesar 4,88 % atau sebanyak 15 kelompok, diikuti dengan yang memiliki keturunan sebesar 5,54% atau sebanyak 17 kelompok. Dari perkumpulan kelompok sosial

yang menyatakan tidak memiliki persyaratan untuk menjadi anggota kelompok sosial ternyata terbanyak dari anggota kelompok Rukun Tetangga RT/RW, PKK dan Dasawisma. Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi anggota kelompok tidak dituntut persyaratan yang berat, kriteria anggota kelompok cukup berdomicili/bertempat tinggal di wilayah tertentu. Karena perkumpulan ini dibentuk oleh masyarakat sehingga persyaratan keanggotaannya dan kepengurusannya diatur sendiri oleh kelompok tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam menentukan periode

Sumber daya manusia dapat dilihat dari segi pendidikan dan usia. Dari segi pendidikan, anggota masing-masing perkumpulan yang dijadikan responden menjawab lebih dari satu tingkat/jenjang pendidikan. Artinya anggota perkumpulan yang terbanyak adalah tamatan SLTA kemudian diikuti yang berpendidikan SLTP dan Sekolah Dasar.

Namun dalam kajian ini yang dapat diketahui mengenai jenjang pendidikan hanyalah responden pengurus kelompok sosial dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jenjang Pendidikan Responden Pengurus Kelompok Sosial.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	4	1,30
2	Sekolah Dasar	33	10,75
3	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	92	29,97
4	Sekolah Menengah Tingkat Atas	166	54,07
5	Akademi/Perguruan Tinggi	12	3,91
Jumlah		307	100

Sumber: Hasil Pendataan di Wilayah Kelurahan Cibeureum Tahun 2006.

kepengurusannya pun paling banyak kurang dari 5 tahun sebesar 87,30% atau sebanyak 268 kelompok; lainnya selama periode 6 – 10 tahun sebanyak 24 atau sebesar 7,82% diikuti selama lebih dari 10 tahun sebanyak 15 kelompok atau sebesar 4,89%. Terhadap jawaban pertanyaan yang menjawab kepengurusan kelompok dipegang atau dijabat lebih dari 10 tahun ini menunjukkan bahwa kepengurusan tersebut memiliki masa kerja yang tidak ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perkumpulan masih sangat sederhana dan belum mengacu pada aturan-aturan yang jelas, biasanya masih berdasarkan saling percaya dan menghormati yang tua, sehingga yang ditunjuk sebagai ketua/pengurus kelompok adalah tokoh yang disegani atau dianggap tua, tanpa melihat kemampuan untuk mengelola perkumpulan. Perkumpulan seperti ini biasanya masih sangat konvensional, tradisional dan berjalan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalani, tanpa ada upaya pengembangan baik program maupun kegiatannya.

D. Sumber Daya

Sumber daya dari perkumpulan sosial hasil kajian, dapat diuraikan pada dua sumber yakni: sumber daya manusia dan sumber dana.

Sedangkan dari segi usia anggota masing-masing perkumpulan memiliki anggota yang terbanyak diperkirakan berusia antara 19 – 39 tahun mencapai sebesar (40,80%) dan yang berusia 40 – 60 tahun sebesar 36,80%. Ini menunjukkan bahwa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja perkumpulan.

Jika dilihat dari sumber dana masing-masing kelompok memiliki sumber dana dari iuran anggota dan dari sumbangan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa kemauan anggota berkorban untuk kelangsungan kegiatan kelompoknya cukup besar.

E. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan kelompok/perkumpulan sosial tidak dapat disajikan dalam bentuk data angka, karena jawaban yang diperoleh semuanya berasal dari pertanyaan terbuka dan jawabannya sangatlah beragam. Namun program dan kegiatan perkumpulan tersebut kebanyakan selaras dengan jenis kelompoknya. Kegiatan yang dilakukan perkumpulan tersebut terbanyak adalah kegiatan arisan, simpan-pinjam, dan kegiatan keagamaan terutama pengajian. Kegiatan tersebut dilakukan seperti kelompok PKK,

Dasawisma, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Arisan, Paguyuban dan rata-rata mempunyai kegiatan arisan dan simpan-pinjam sebagai pengikat dan bahan pertemuan kelompok.

Hampir semua program dan kegiatan yang dilakukan perkumpulan sosial ditujukan untuk mensejahterakan anggota dengan cara mengutamakan dalam memberikan pelayanan kebutuhan anggota dari pada kebutuhan orang yang memerlukannya namun bukan anggota kelompok. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya dan sarana yang dimiliki perkumpulan-perkumpulan sosial tersebut. Meskipun demikian dapat dikatakan hampir semua program dan kegiatan telah menunjukkan upaya-upaya penanganan masalah sosial dengan metoda "case work" dan "group work". Jika kita telusuri perkumpulan-perkumpulan tersebut telah memiliki konsep dasar pekerjaan sosial, hanya saja mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara pengembangannya.

F. Nilai-Nilai Sosial Budaya

Dari berbagai kepentingan/kebutuhan/persoalan yang dirasakan oleh masyarakat menumbuhkan keinginan kelompok untuk memecahkan kepentingan secara bersama-sama. Berbagai kepentingan itu berupa kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan untuk hidup, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri dan sebagainya. Keinginan untuk memecahkan pelbagai kebutuhan merupakan masalah yang perlu diselesaikan melalui pembentukan perkumpulan sosial yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama ini bersumber pada nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki dan dikembangkan di tengah

masyarakat dan merupakan kebiasaan masyarakat sejak jaman nenek moyangnya. Nilai-nilai tersebut antara lain hasrat membantu orang lain yang sedang kesusahan, kepercayaan untuk pinjam-meminjam barang atau uang, menyampaikan informasi atau berita yang baik atau buruk, duka maupun suka, gotong royong dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dari hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengatakan nilai solidaritas perlu dipertahankan dengan cara melalui kegiatan gotong royong sebanyak 292 atau sebesar 95,11%, kemudian diikuti membantu warga atau anggota perkumpulan yang terkena musibah sebanyak 260 informan atau sebesar 84,69%. Angka tersebut membuktikan bahwa kelompok atau perkumpulan sosial tersebut sungguh-sungguh dijiwai oleh nilai-nilai yang bertujuan untuk membantu orang lain melalui kegiatan gotong-royong. Keadaan ini merupakan potensi kesetiakawanan sosial yang dapat dikembangkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai wahana untuk meningkatkan ketahanan sosial di tingkat lokal dengan tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah.

G. Jaringan Kerja

Dari hasil kajian di lokasi pendataan dapat diketahui bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dapat dikatakan belum tampak adanya jaringan kerja antar kelompok atau perkumpulan sosial yang ada, kecuali kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya intervensi dari pemerintah yang sebagian telah membentuk jaringan kerja, namun jaringan kerja itu masih terbatas pada kelompok sejenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data tabel 5 berikut:

Tabel 5. Jaringan Kerja Kelompok Sosial di Lokasi Kajian.

No	Jenis Kelompok	Jaringan Kerja Kelompok Sosial					
		Organisasi Sosial		Pemerintah		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dasawisma	89	85,58	15	14,42	104	100
2	Posyandu	0	0	20	100	20	100
3	BKB	0	0	4	100	4	100
4	KUBE	0	0	1	100	1	100
5	Pemuda/Karangtaruna	0	0	18	100	18	100
6	KWT	0	0	2	100	2	100
7	PBHI	1	100	0	0	1	100
8	Pengajian	18	100	0	0	18	100
9	Paguyuban Warga Desa	76	100	0	0	76	100
10	BKL	0	0	3	100	3	100
11	BKR	0	0	3	100	3	100
12	LPM/LKMD	0	0	1	100	1	100
13	Peta Keluarga	0	0	11	100	11	100
14	R/1/KS	0	0	18	100	18	100
15	R/1/SUB	0	0	18	100	18	100
16	UP2KS	0	0	3	100	3	100
17	UP2K	0	0	6	100	6	100
Jumlah		184	59,93	123	40,07	307	100

Sumber: Hasil Pendataan di Wilayah Kelurahan Cibeureum Tahun 2006.

Dari hasil pendataan kurang dari 50% atau sebanyak 123 kelompok sosial jaringan kerja terbentuk karena adanya bantuan dari pemerintah, sisanya dari pengaruh kelompok atau lembaga lain atau merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga sampai Kabupaten atau Provinsi. Contohnya kelompok Dasawisma yang anggotanya juga termasuk anggota kelompok PKK yang memiliki jaringan kerja bentukan pemerintah biasanya berupa jaringan sejenis vertikal (berjenjang) seperti kelompok RT, RW, PKK. Sedangkan yang horisontal seperti Paguyuban, PBHI, Pengajian, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).

Sebagian kegiatan bertumpu pada sumber-sumber lokal, sehingga keberadaan kelompok-kelompok bentukan masyarakat atau organisasi sosial lebih diwarnai dengan dukungan lokal. Kebanyakan sumber-sumber yang digalipun lebih banyak pada intern anggota mereka atau donatur yang merasa terikat oleh kewajiban moral. Dukungan dari pemerintah terhadap perkumpulan sosial masih sangat terbatas pada perkumpulan bentukan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah setempat.

H. Pembinaan Kelompok

Langkah-langkah pembinaan untuk memberikan motivasi dan melatih tenaga kerja atau dalam memberikan jasa nasehat yang diberikan kepada pengurus kelompok sebaiknya terlebih dahulu dikaji agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan permintaan anggota kelompok. Karena tujuan pembinaan adalah pelatihan dalam bentuk pengelolaan, pemasaran hasil produksi, penggunaan teknologi dan pengelolaan keuangan. Program pembinaan harus juga ditunjang dengan adanya bahan baku atau alat peragaan.

Berdasarkan hasil kajian ternyata pembinaan kelompok di Kota Cimahi selama ini masih terbatas pada uji pendataan atau pendataan awal yang dilakukan hanya pada sebagian kelurahan. Padahal menurut pejabat dari Dinas Sosial, para pengurus kelompok perlu mendapatkan pembinaan dan bantuan stimulan untuk keperluan organisasi. Selain itu juga perlu adanya forum komunikasi yang tujuannya untuk komunikasi edukasi dan tukar informasi antar kelompok sosial yang sejenis maupun yang heterogen. Dengan pemberian stimulan tersebut, dari Dinas Sosial khususnya

perlu memonitoring kegiatan dan penggunaan dana bagi kelompok sosial dengan cara mengadakan pendataan dan mengidentifikasi kelompok sosial yang ada.

I. Manfaat Kelompok Sosial bagi Anggota

Manfaat kelompok sosial bagi anggota, ternyata semua informan anggota yang dijadikan sumber data dalam kajian merasakan manfaatnya. Manfaat yang dirasakan antar anggota kelompok tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi sosial adalah meningkatnya rasa kebersamaan dan kegotongroyongan yang satu dengan yang lainnya, sedangkan manfaat dari segi ekonomi adalah adanya fasilitas untuk mendapatkan pinjaman baik barang, uang maupun tenaga. Hal ini dikarenakan jenis kelompok sosial yang mereka ikuti berbeda, juga karena keterampilan anggota untuk mengembangkan kelompok juga bervariasi.

Selain memiliki manfaat ekonomi, dilihat dari segi sosial tampak meningkatnya kemampuan berorganisasi dan bertambahnya teman. Disamping itu, pengetahuan anggota kelompok juga meningkat seiring dengan seringnya mengikuti pertemuan yang diadakan untuk membahas persoalan dan hambatan yang timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan secara rutin.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan di Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, partisipasi serta keterlibatan semua/lapisan masyarakat sangatlah diharapkan. Peran kelompok sosial saat ini sudah diakui oleh pemerintah daerah, mengingat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan sangat membantu terlaksananya program pembangunan terutama dalam menciptakan ketahanan sosial.

1. WKSBM atau perkumpulan sosial di Kelurahan Cibereum sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun. Jumlah pranata sosial mencapai 300 perkumpulan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) jenis perkumpulan sosial.

2. WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam upaya mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat. Pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan yang berdomisili pada wilayah tertentu.
3. Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dari iuran anggotanya masing-masing.
4. Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai oleh semangat ingin membantu orang lain dan jiwa gotong royong.

B. Saran

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan fasilitasi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalan sumber dana.

Peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih sangat luas, mengingat kompleksnya permasalahan dan jumlah serta luas wilayah golongan ekonomi lemah masih sangat banyak. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi hal itu agar program-program yang dilakukan kelompok-kelompok sosial yang ada di daerah mendapatkan dukungan dari pemerintah secara penuh dan dapat dimanfaatkan sebagai pendamping program peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di daerah-daerah. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan kelembagaan yang ada di daerah dengan cara:

1. Memberikan pelatihan bagi pengurus kelompok sosial, dengan tujuan peningkatan profesionalisme pelayanan sosial.
2. Perlu memberikan bantuan stimulan untuk menunjang operasional kelompok sosial yang ada.
3. Perlu dibentuk forum yang tujuannya untuk membentuk wadah/sarana komunikasi, edukasi dan memberikan informasi antar

- kelompok sosial di tingkat lokal baik untuk kelompok yang sejenis maupun yang heterogen.
4. Perlu adanya monitoring dari pemerintah dalam bentuk pendataan dan pengidentifikasian kelompok sosial yang ada di daerah kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syarwani dan Meuthia Gani Rochman, 1992. *Pembangunan Swadaya Nasional*; Jakarta, LP3ES.
- Anonim, 1997. *Peranan Program Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE*, Jakarta; Dit. Bin Bansos.
-, 1998. *Menteri Sosial RI Pada Sidang Kabinet terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan*, Jakarta.
-, 2003. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta; Departemen Sosial RI.
-, 2003. *Pola Penanggulangan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta; Departemen Sosial RI.
- Hendrata, Lukas, 1993. *Program Pengentasan Masyarakat Miskin*, Solo; Bergetar.
- Larso, Wursito, 1995. *Pemerataan Pembangunan Antara Harapan dan Kenyataan*, Solo; Bergetar.
- Sutopo HB, 1993. *Konsep Pembangunan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan Ditinjau Dari Sudut Sosiologi Pembangunan Antara Peluang dan Tantangan*. Solo; Bergetar.
- Twikromo, Argo, 1993. *Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Kepemimpinan Kelompok*. Solo; Bergetar.
- Prastiwi, Ety, 1993. *Wanita Dalam Peranannya Sebagai Kader Pembangunan dan Ibu Rumah Tangga*. Solo, Bergetar.
- Maryanto, 1996. *Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ekonomi Rakyat Lewat Jaringan*. Solo; Bergetar.
- Muhammad, Rusdin, 1993. *Kelembagaan Desa Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat*. Solo; Bergetar.
- Midgley, James, 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta; Diperta Islam Departemen Agama.
- Nurdin dan Suradi, 2004. *Penelitian Peranan Organisasi Lokal Dalam Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol.9, No.01, Pusbang UKS, Balatbang; Departemen Sosial.
- Korten, David.C, 1982. *Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Wardani, Nila, 1993. *Sebuah Bentuk Dampingan Bagi Wanita Pekerja Industri Rumah Tangga*, Solo; Bergetar.
- Wiroto, Paulus, 2004. *Kontruksi Jaring Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual)* Jakarta; Makalah.

BIODATA PENULIS:

Suyanto, Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989, Kini Ajun Peneliti Madya pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.